

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Intensitas Akses Media Sosial

a. Pengertian Intensitas Akses Media Sosial

Pengertian 'intensitas' jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Selain itu, intensitas dapat diartikan juga sebagai tingkat kekuatan dari sesuatu hal. Intensitas merupakan tingkat dari suatu kesungguhan ataupun kekuatan yang dilakukan seseorang dengan kemampuan yang ia miliki dan dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal (Bagas, 2021). Tingkat atau ukuran intens mengacu pada waktu (keseringan) yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu hal secara tetap dan dilakukan secara terus-menerus.

Menurut Ajzen (Dalam Paraera dan Pedhu, 2025) berpendapat bahwa intensitas merupakan seberapa sering atau frekuensi seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu yang didasari dengan pola perilaku yang sama secara terus-menerus. Frekuensi yang dimaksud disini adalah seberapa sering seseorang mengulang kegiatannya beberapa kali sebagai target pengoperasian sesuatu hal. Semakin sering seseorang mengulang kegiatan yang sama, maka semakin tinggi pula intensitas kegiatannya. Sebaliknya, seseorang dikatakan

memiliki intensitas kegiatan yang rendah jika tidak terlalu sering mengulangi kegiatan yang sama pada satu waktu.

Intensitas yang akan dibahas disini dikaitkan pula dengan media sosial. Media sosial sering kali disebut medsos atau sosmed. Media sosial berasal dari penggabungan dua kata, yaitu kata media dan sosial. Media sosial merupakan ruang digital untuk mempermudah manusia untuk mendapatkan serta membagikan informasi ataupun cerita pribadi secara publik (Ananda and Putri, 2025). Media sosial bukan hanya sekedar media komunikasi belaka, disini semua orang dapat membagikan opini ataupun pendapat pribadi yang bisa ditonton semua orang.

Definisi intensitas media sosial secara operasional lebih lanjut dikemukakan oleh Soviana sebagaimana dikutip oleh (Ananda and Putri, 2025) bahwa intensitas penggunaan media sosial mengacu pada seberapa sering dan berapa lama seseorang mengakses media sosial, yang berkaitan dengan frekuensi pengguna dan durasi waktu yang dihabiskan untuk memperoleh informasi maupun mengakses berbagai konten yang tersedia. Selain itu, Al Aziz (dalam Ananda and Putri, 2025) menambahkan bahwa intensitas penggunaan media sosial mencerminkan perhatian dan minat pengguna, seperti mengunggah konten, memberi komentar, atau sekadar melihat informasi. Semakin tinggi intensitasnya, semakin besar pula waktu dan energi yang dicurahkan.

Dalam konteks khusus penggunaan media sosial untuk kepentingan informasi politik, Salim and Jannah (2026) mendefinisikan intensitas sebagai ukuran tingkat keterlibatan pengguna yang tidak hanya dilihat dari seberapa sering seseorang mengakses platform, tetapi juga mencakup kedalaman atensi atau perhatian yang diberikan terhadap konten serta preferensi terhadap jenis media sosial yang digunakan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda merupakan pengguna aktif terbesar berbagai platform media sosial, sehingga intensitas penggunaan mereka memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan wawasan sosial dan politik.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli di atas, dapat dirumuskan definisi operasional variabel intensitas akses media sosial dalam penelitian ini, yaitu tingkat keterlibatan mahasiswa secara menyeluruh dalam menggunakan platform media sosial yang diukur melalui empat dimensi: frekuensi akses, durasi penggunaan, tingkat atensi terhadap konten, serta jenis platform yang digunakan. Keempat dimensi ini secara bersama-sama menggambarkan seberapa dalam dan seberapa sering mahasiswa berinteraksi dengan konten-konten di media sosial, termasuk konten yang bersifat politis dan kenegaraan.

b. Dimensi dan Indikator Intensitas Akses Media Sosial

Untuk mengukur intensitas penggunaan media sosial secara empiris, diperlukan indikator-indikator yang terukur dan operasional.

Dalam penelitian Ananda dan Putri (2025) pada mahasiswa Universitas Sriwijaya menggunakan empat aspek pengukuran intensitas media sosial, yakni perhatian atau atensi (*attention*), penghayatan (*absorption*), durasi (*duration*), dan frekuensi (*frequency*). Sedangkan dalam penelitian Andriani dan Sulistyorini (2022) menjadikan media sosial yang digunakan (*platform*), latar belakang penggunaan, frekuensi penggunaan media sosial, dan lama penggunaan media sosial (durasi) menjadi aspek penelitian yang dikaji. Aspek-aspek ini menjadi dimensi yang saling melengkapi dalam menggambarkan profil penggunaan media sosial seseorang secara komprehensif.

Pertama, dimensi frekuensi merujuk pada seberapa sering seseorang mengakses media sosial dalam kurun waktu tertentu. Frekuensi penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa termasuk dalam kategori tinggi (Andriani and Sulistyorini, 2022). Sebagian besar responden mengakses media sosial setiap saat, yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari tanpa adanya waktu khusus yang dialokasikan. Selain itu, sebagian responden mengakses media sosial sebanyak 3–4 kali dalam sehari, sementara sebagian lainnya mengakses sebanyak 1–2 kali dalam sehari. Hanya sebagian kecil responden yang tidak mengakses media sosial setiap hari.

Kedua, dimensi durasi menunjukkan lamanya waktu yang dihabiskan pengguna setiap kali atau setiap hari dalam mengakses media sosial. Berdasarkan hasil penelitian Andriani dan Sulistyorini (2022), durasi penggunaan media sosial oleh mahasiswa bervariasi. Sebagian besar responden mengakses media sosial selama 1–2 jam setiap kali penggunaan. Selanjutnya, terdapat responden yang mengakses media sosial lebih dari 5 jam, kurang dari 1 jam, 2–3 jam, serta 3–5 jam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menggunakan media sosial pada setiap kali mengaksesnya.

Ketiga, dimensi atensi atau perhatian (*attention*) merujuk pada tingkat keseriusan dan fokus yang diberikan pengguna terhadap konten yang dikonsumsi. Ananda and Putri (2025) menegaskan bahwa aspek perhatian merupakan salah satu indikator dengan pengaruh terbesar terhadap tingginya intensitas penggunaan media sosial. Atensi yang tinggi ditandai oleh perilaku membaca dan menyimak konten secara tuntas, bukan sekadar *scrolling* tanpa arah, dan ini memiliki implikasi signifikan terhadap pemahaman pengguna atas informasi yang diterimanya, termasuk informasi politik.

Keempat, dimensi jenis platform atau media sosial yang digunakan turut menentukan kualitas dan relevansi informasi yang diterima. Platform media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa adalah WhatsApp, kemudian diikuti secara berturut-turut

oleh TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter (X), dan Line (Hermila *et al.*, 2023). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa lebih banyak memanfaatkan media sosial yang menyediakan kemudahan dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan menikmati berbagai jenis konten digital. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi dari platform berbasis teks menuju platform berbasis konten visual dan video. Dalam konteks literasi politik, pilihan platform berpengaruh terhadap format dan kedalaman informasi politik yang dapat diserap oleh pengguna.

Dari uraian di atas, keempat dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk profil intensitas akses media sosial mahasiswa. Frekuensi dan durasi mengukur aspek kuantitatif penggunaan, sementara atensi dan jenis platform mencerminkan aspek kualitatif keterlibatan. Dalam penelitian ini, keempat dimensi tersebut dijadikan dasar penyusunan instrumen angket untuk mengukur variabel intensitas akses media sosial mahasiswa Universitas PGRI Madiun.

c. Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Akses Media Sosial

Intensitas penggunaan media sosial tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Faktor pertama adalah motivasi dan kebutuhan individu. Mengacu pada *Uses and Gratifications Theory*, seseorang secara aktif memilih media yang dinilai mampu memenuhi kebutuhannya, yaitu

kebutuhan informasi, hiburan, identitas personal, maupun interaksi sosial (Nesra, Januar and Sulton, 2025). Dalam konteks mahasiswa, motivasi mencari informasi politik atau terlibat dalam diskusi publik menjadi salah satu pendorong utama intensitas akses media sosial yang tinggi.

Faktor kedua adalah kemudahan akses teknologi. Kepemilikan *smartphone* dan konektivitas internet yang stabil membuat mahasiswa dapat mengakses media sosial kapan saja, bahkan di tengah kegiatan belajar sekalipun (Aprillia and Sariani, 2025). Kemudahan ini menyebabkan penggunaan media sosial menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan karena hambatan akses yang semakin rendah. Semakin mudah teknologi dapat dijangkau, semakin tinggi pula kecenderungan individu untuk menggunakannya secara intensif.

Faktor ketiga adalah pengaruh lingkungan sosial dan teman sebaya. Dinamika kelompok sosial, terutama di kalangan mahasiswa yang berinteraksi dalam komunitas kampus, secara signifikan mendorong penggunaan *platform* media sosial tertentu (Falca *et al.*, 2023). Ketika satu platform menjadi norma dalam suatu kelompok, individu dalam kelompok tersebut cenderung menggunakannya dengan frekuensi dan durasi yang serupa agar tetap terhubung dan relevan secara sosial.

Faktor keempat adalah karakteristik konten dan algoritma platform. Algoritma *platform* media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan menampilkan konten yang paling menarik dan relevan secara personal, yang sebagian besar didominasi oleh konten hiburan (Fatih, 2024). Algoritma ini menciptakan kondisi di mana pengguna menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang awalnya direncanakan, sehingga berkontribusi langsung pada tingginya durasi dan frekuensi penggunaan.

Secara keseluruhan, faktor motivasi, kemudahan akses, lingkungan sosial, dan desain algoritmik platform saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk pola intensitas penggunaan media sosial mahasiswa. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting dalam penelitian ini karena memberikan konteks mengapa intensitas akses media sosial mahasiswa cenderung tinggi, dan bagaimana kondisi tersebut berpotensi memengaruhi literasi politik mereka.

d. Dampak Intensitas Akses Media Sosial

Intensitas penggunaan media sosial membawa konsekuensi yang bersifat dua sisi: positif sekaligus negatif. Dari sisi positif, media sosial yang diakses secara intensif dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan. Media sosial terbukti berfungsi sebagai ruang publik digital yang mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam diskursus politik (Febriano and Sari, 2026). Lebih jauh, keterlibatan dalam aktivitas politik digital seperti

mengikuti berita dan berdiskusi merupakan bagian penting dari pendidikan politik generasi muda (Silvia, 2024).

Dari sisi dampak positif lainnya, intensitas akses media sosial yang tinggi juga dapat mendorong partisipasi dan kesadaran politik. (Nesra, Januar and Sulton, 2025) menemukan bahwa meskipun efek media sosial terhadap partisipasi politik bersifat relatif lemah ($R^2 = 0,083$), arahnya tetap positif dan signifikan secara statistik ($B = 0,717$; $p < 0,05$). Artinya, semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin besar kecenderungan mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas politik digital, meskipun bentuk partisipasinya masih didominasi oleh pola konsumsi informasi yang bersifat pasif.

Namun di sisi negatif, intensitas tinggi yang tidak disertai kemampuan kritis dapat mendorong terbentuknya *echo chamber* dan *filter bubble*. Algoritma *platform* cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga individu hanya terpapar perspektif yang sejalan dengan pandangannya sendiri (Arifuddin and Hermawan, 2025). Kondisi ini secara tidak langsung mempersempit wawasan politik pengguna dan menghambat pemikiran kritis.

Dampak negatif lainnya adalah potensi paparan terhadap disinformasi dan hoaks. Menurut Arifianto (dalam Marbun *et al.*, 2025) *platform* media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi tidak terverifikasi yang berpotensi memanipulasi opini

publik. Dalam konteks politik, hoaks dapat secara serius mendistorsi persepsi mahasiswa terhadap isu kebijakan, tokoh politik, maupun proses demokrasi. Rendahnya kemampuan menyaring informasi menjadikan pengguna dengan intensitas tinggi justru lebih rentan terhadap paparan disinformasi politik.

Dampak intensitas akses media sosial bersifat kondisional, ia dapat meningkatkan wawasan dan partisipasi politik apabila disertai kemampuan literasi yang memadai, namun dapat pula memperburuk kualitas pemahaman politik apabila dilakukan tanpa daya saring yang kritis. Temuan ini menjadi landasan penting mengapa penelitian ini memandang intensitas akses media sosial sebagai variabel yang secara signifikan mempengaruhi, dan bukan secara otomatis meningkatkan, literasi politik mahasiswa.

e. Relevansi Media Sosial dalam Konteks Politik

Dalam perkembangan demokrasi kontemporer, media sosial telah bertransformasi dari sekadar alat komunikasi personal menjadi arena utama kontestasi dan sosialisasi politik. Menurut Baca (dalam Silviah, 2024) mengemukakan bahwa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk terlibat dalam proses politik secara lebih langsung, interaktif, dan tanpa batasan geografis. Kehadiran fitur-fitur interaktif seperti *like*, *comment*, dan *share* menciptakan ekosistem komunikasi politik yang horizontal dan partisipatif.

Secara khusus, dalam konteks Pemilihan Umum dan proses demokrasi lokal, media sosial terbukti berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda. Berdasarkan survei *We Are Social* tahun 2024, Instagram menempati posisi sebagai platform dengan pengguna terbesar kedua di Indonesia dengan penetrasi mencapai 85,3% dari total populasi (Nabila, Nurhadi and Kurniawan, 2025). Platform ini secara khusus efektif dalam menyebarkan kampanye dan informasi politik kepada Gen Z karena kemampuannya menyajikan konten visual yang mudah dicerna.

Dalam Nesra, Januar, dan Sulton (2025) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa partisipasi politik digital, yang mencakup aktivitas seperti mengikuti akun resmi lembaga pemerintah, berbagi ulang pesan politik, mengikuti petisi daring, dan berpartisipasi dalam forum diskusi daring, merupakan bentuk keterlibatan demokratis yang khas di era digital. Partisipasi ini tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik dalam pemilu, melainkan mencakup spektrum aktivitas yang lebih luas di ruang siber. Media sosial menjadi jembatan yang menghubungkan kesadaran politik individu dengan tindakan kolektif dalam ruang publik digital.

Relevansi media sosial dalam konteks politik semakin kuat apabila dikaitkan dengan peran mahasiswa sebagai agen sosial. Sebagai kelompok yang secara akademis dipersiapkan untuk memahami konstruksi bernegara, mahasiswa, terutama di program

studi PPKn, Sejarah, dan Hukum, memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memanfaatkan media sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Tingginya intensitas akses media sosial di kalangan mahasiswa, bila diarahkan pada konten-konten politik yang berkualitas, berpotensi menjadi modal penting bagi penguatan literasi politik dan partisipasi demokratis.

2. Literasi Politik

a. Pengertian Literasi Politik

Literasi politik merupakan konsep yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penguasaan fakta-fakta tentang dunia politik. Partisipasi politik merupakan perwujudan nyata dari literasi politik, sebagai keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan politik dengan tujuan memengaruhi keputusan dan kebijakan publik (Yanto dan Sari, 2025). Dari perspektif ini, literasi politik bukan sekadar kemampuan kognitif untuk mengingat nama lembaga atau pejabat negara, melainkan suatu kapasitas yang memungkinkan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan merespons realitas politik secara bermakna .

Literasi politik merujuk pada pemahaman serta pengetahuan tentang proses serta isu-isu politik yang memungkinkan seseorang menjalankan perannya dengan baik, serta berpartisipasi secara aktif dan efektif (Amrullah, Dwivayani and Wikandana, 2025). Definisi ini secara tegas membedakan literasi politik dari pengetahuan politik

semata. Seseorang dapat memiliki banyak pengetahuan tentang sistem politik, tetapi belum disebut berliterasi politik apabila ia tidak mampu menggunakan pengetahuan tersebut untuk berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Dalam konteks media digital, literasi digital yang merupakan prasyarat bagi literasi politik di era digital, mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi yang tersedia melalui teknologi digital, termasuk kemampuan memahami secara kritis terhadap informasi yang diterima melalui internet (Nurviana, Putri and Rachman, 2024). Oleh karena itu, dalam era pascakebenaran (*post-truth*) di mana disinformasi dan hoaks politik menyebar melalui media sosial, literasi politik tidak dapat dipisahkan dari kompetensi menyaring dan memverifikasi informasi secara digital.

Perbedaan antara literasi politik dan pengetahuan politik semata perlu ditekankan secara eksplisit. Denver dan Hands (dalam Suwenda and Dewi, 2024) mendefinisikan literasi politik sebagai kondisi di mana seseorang memiliki informasi mengenai politik, mengetahui proses politik seperti pemilihan umum, dan berkontribusi serta memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara. Literasi politik tidak hanya berlandaskan aspek kognitif, tetapi juga meliputi perilaku dan sikap yang mendukung kemampuan tersebut dalam kehidupan nyata. Definisi ini menegaskan bahwa literasi politik bersifat

multidimensional: kognitif (pengetahuan), afektif (minat dan sikap), serta konatif (kecenderungan berpartisipasi).

literasi politik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, kesadaran/minat, dan kecenderungan partisipasi yang dimiliki mahasiswa dalam memahami sistem politik, menganalisis isu kebijakan publik, serta berperan aktif dalam proses demokrasi, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Definisi ini menekankan bahwa literasi politik melampaui pengetahuan faktual belaka dan menuntut keterlibatan sikap serta perilaku yang nyata.

b. Dimensi dan Indikator Literasi Politik

Literasi politik sebagai konstruk yang multidimensional diukur melalui beberapa indikator utama. Riduan (dalam Nabila, Nurhadi and Kurniawan, 2025) menetapkan tiga indikator utama literasi politik, yaitu pengetahuan politik, partisipasi politik, dan minat politik. Ketiga indikator ini membentuk suatu kontinum yang menggambarkan perkembangan literasi politik dari level pemahaman menuju keterlibatan aktif dalam kehidupan demokratis.

Dimensi pertama adalah pengetahuan politik (*political knowledge*). Informasi politik dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana sistem politik bekerja, pengetahuan tentang debat politik saat ini dan politik sehari-hari, serta pengetahuan tentang aktor politik dan perbedaan ideologis mereka (Michalski *et al.*, 2023).

Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi kemampuan analitis yang lebih tinggi dalam literasi politik. Pengetahuan mengenai struktur media dan sistem politik merupakan prediktor signifikan bagi kemampuan seseorang dalam memahami peristiwa-peristiwa politik aktual (Guess and Munger, 2023).

Dimensi kedua adalah minat dan kesadaran politik. Literasi politik tidak hanya berlandaskan aspek kognitif, tetapi juga meliputi aspek sikap dan motivasi untuk memenuhi kemampuan tersebut (Farikiansyah *et al.*, 2024). Seseorang yang memiliki minat politik tinggi cenderung secara aktif mencari informasi terkait isu politik, mengikuti perkembangan kebijakan publik, dan bersedia terlibat dalam diskusi tentang persoalan kenegaraan. Minat politik ini merupakan prasyarat afektif bagi terbentuknya partisipasi politik yang bermakna.

Dimensi ketiga adalah partisipasi politik. Gibson dan Cantijoch (dalam Baboš and Világi, 2024) membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan seperti ikut pemilu, aktivitas kampanye, aksi protes, menghubungi pejabat publik, aksi komunal, dan konsumerisme politik. Sementara partisipasi pasif mencakup perhatian pada berita (*news attention*), diskusi isu politik, dan ekspresi opini. Partisipasi pasif lebih dominan di kalangan mahasiswa, dengan *News Attention* mencapai 76% dan *Discussion* 65,2%, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa

masih berada pada tahap konsumsi informasi daripada tindakan politik yang substantif (Nesra, Januar and Sulton, 2025).

Dari ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa literasi politik bukan fenomena tunggal, melainkan proses bertahap dari pengetahuan menuju kesadaran, dan akhirnya partisipasi. Dalam instrumen penelitian ini, ketiga dimensi tersebut akan dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan angket yang mengukur sejauh mana mahasiswa UNIPMA memiliki kapasitas literasi politik yang utuh, bukan sekadar menyimpan pengetahuan tentang sistem pemerintahan.

c. Tingkatan Literasi Politik

Literasi politik dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kedalaman pemahaman dan intensitas keterlibatan seseorang dalam kehidupan politik. Dalam konteks generasi muda Indonesia, Japelidi (dalam Rahmawati and Rifai, 2024) melaporkan bahwa generasi muda memiliki indeks literasi digital lebih dari yang menunjukkan tidak adanya hambatan teknis dalam mengakses internet untuk mencari data politik. Namun demikian, indeks kemampuan partisipasi dan kolaborasi mereka justru masih tergolong rendah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kapasitas mengakses informasi dengan kemauan untuk terlibat secara aktif.

Tingkatan literasi politik rendah ditandai oleh sikap pasif dan ketidakmampuan menyaring informasi secara kritis. Pada tingkatan ini pula, seseorang sangat rentan terhadap pengaruh disinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial. Tingkatan literasi politik sedang ditandai oleh adanya pengetahuan politik dasar dan minat yang mulai terbentuk, namun kemampuan analisis dan verifikasi informasi masih terbatas.

Tingkatan literasi politik tinggi dicirikan oleh kemampuan menganalisis informasi secara kritis, memverifikasi kebenaran berita, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Gen Z dengan literasi politik yang baik mampu memahami isu secara mendalam, mengasah kemampuan membedakan pesan yang positif dan negatif, serta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi (Bramantyo, Sulistiyawati and Ariefin, 2025). Pada tingkatan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga mampu berperan sebagai produsen dan agen penyebaran informasi yang bertanggung jawab.

Terdapat tiga tingkatan literasi politik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, mencerminkan gradasi kapasitas warga negara dalam berdemokrasi. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang tingkatan literasi politik diperlukan untuk menginterpretasikan skor angket mahasiswa UNIPMA dan menentukan apakah intensitas akses

media sosial mereka benar-benar berkorelasi dengan peningkatan kualitas literasi politik, ataukah justru sebaliknya.

d. Faktor yang Mempengaruhi Literasi Politik

Literasi politik mahasiswa tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan politik merupakan aspek krusial untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Nabila, Nurhadi and Kurniawan, 2025). Keberhasilan pendidikan politik di institusi pendidikan akan berdampak pada terciptanya warga negara yang berkualitas. Dalam konteks Program Studi PPKn, Sejarah, dan Hukum di UNIPMA, kurikulum yang secara eksplisit mengajarkan sistem pemerintahan, hukum, dan sejarah politik nasional menjadi faktor determinan bagi perkembangan literasi politik mahasiswa.

Faktor kedua adalah media dan paparan informasi. Partisipasi politik di dunia maya, seperti bergabung dalam kelompok diskusi politik atau berbagi opini mengenai isu-isu politik, mendorong individu untuk beradaptasi dengan berbagai platform digital dan berkontribusi pada pengembangan keterampilan digital yang lebih tinggi (Silvia, 2024). Semakin sering seseorang berinteraksi dengan informasi politik melalui media digital, semakin besar pula peluang mereka untuk mengembangkan pemahaman politik yang lebih matang, asalkan disertai kemampuan berpikir kritis yang memadai.

Faktor ketiga adalah lingkungan sosial dan keluarga. Diskusi-diskusi politik dalam lingkungan keluarga dan komunitas kampus membentuk disposisi politik seseorang sejak dini (Farikiansyah *et al.*, 2024). Lingkungan yang mendorong keterbukaan berpendapat, menghargai perbedaan perspektif, dan aktif mendiskusikan isu-isu publik akan melahirkan individu dengan literasi politik yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok dengan tingkat informasi politik yang tinggi cenderung memiliki tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan partisipasi politik yang lebih tinggi pula (Marbun *et al.*, 2025).

Faktor keempat adalah pengalaman partisipasi politik itu sendiri. Menurut Sunarto, Sulton, dan Mahardhani (dalam Nesra, Januar and Sulton, 2025) menekankan bahwa pendidikan politik sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran politik yang rasional. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, forum-forum diskusi publik, dan kegiatan advokasi sosial merupakan laboratorium nyata pembentukan literasi politik. Pengalaman langsung ini memberikan konteks yang tidak dapat diperoleh semata-mata melalui konsumsi informasi di media sosial.

Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut, yakni pendidikan formal, paparan media, lingkungan sosial, dan pengalaman berpartisipasi, saling memperkuat dalam membentuk kapasitas literasi politik mahasiswa. Penelitian ini menempatkan media sosial sebagai faktor yang dapat berperan positif dalam pembentukan

literasi politik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana mahasiswa merespons dan memproses informasi yang mereka terima.

e. Peran Literasi Politik bagi Mahasiswa

Mahasiswa menduduki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem demokrasi Indonesia, tidak semata sebagai peserta pemilu masa depan, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang memiliki kapasitas intelektual untuk menganalisis dan mengkritisi realitas politik. Partisipasi politik mahasiswa, yang ditopang oleh literasi digital dan politik yang memadai, merupakan representasi politik kewargaan yang autentik dalam sistem demokrasi (Silvia, 2024). Mahasiswa yang melek politik mampu menempatkan diri sebagai subjek yang aktif dalam proses demokrasi, bukan sekadar objek mobilisasi politik.

Dalam konteks Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan post-truth dan massifnya disinformasi di media sosial, peran literasi politik bagi mahasiswa menjadi semakin krusial. Gen Z dengan literasi politik yang baik memungkinkan mereka untuk bisa memahami isu secara mendalam, serta mengasah kemampuan mereka dalam membedakan pesan yang positif dan negatif dalam berbagai sudut pandang, sehingga lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi (Putra *et al.*, 2024). Kemampuan ini secara

langsung membentengi mahasiswa dari bahaya hoaks dan propaganda politik yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Bagi mahasiswa Program Studi PPKn yang kelak akan menjadi pendidik generasi penerus bangsa, literasi politik bukan sekadar kompetensi pribadi, melainkan tanggung jawab profesional. Pahami politik menjadi hal yang sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi suatu bangsa (Lowery, Gautam and Hess, 2024). Melalui pembentukan dan pengembangan melek politik, warga negara akan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban serta memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kedudukannya sebagai anggota resmi dari suatu negara. Sebagai calon pendidik kewarganegaraan, mahasiswa PPKn dituntut bukan hanya berliterasi politik secara personal, tetapi juga mampu memfasilitasi tumbuhnya literasi politik pada peserta didik mereka kelak.

Dari seluruh pembahasan sub-bab literasi politik ini menegaskan bahwa literasi politik merupakan kompetensi multidimensional yang mencakup pengetahuan, minat, dan partisipasi, yang terbentuk melalui interaksi antara pendidikan formal, paparan media, lingkungan sosial, dan pengalaman berpartisipasi. Dalam penelitian ini, literasi politik mahasiswa UNIPMA dipandang sebagai variabel dependen yang secara teoritis dipengaruhi oleh tingkat intensitas mereka dalam mengakses konten-konten media sosial yang bermuatan politik.

3. Pengaruh Intensitas Akses Media Sosial terhadap Literasi Politik

Hubungan antara intensitas akses media sosial dan literasi politik dapat dijelaskan secara teoritis melalui *Uses and Gratifications Theory* (Teori Penggunaan dan Kepuasan). Teori *Uses and Gratification* mengacu pada Hasny, Renadia, dan Irwansyah (dalam Nesra, Januar and Sulton, 2025), berpijak pada asumsi bahwa individu secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik mereka, meliputi kebutuhan informasi, identitas personal, integrasi sosial, maupun hiburan. Dalam konteks mahasiswa yang mengakses konten politik di media sosial, teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat motivasi mencari informasi politik, semakin tinggi intensitas akses yang dilakukan, dan semakin besar pula peluang terbentuknya pemahaman politik yang lebih matang.

Alfirahmi (dalam Nabila, Nurhadi and Kurniawan, 2025) hubungan antara penggunaan media dan dampaknya dapat dijelaskan melalui *Uses and Effects Theory*. Teori ini merupakan perpaduan antara pendekatan *Uses and Gratifications* dan teori tradisional efek media. Teori ini berpandangan bahwa penggunaan media tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan individu semata, tetapi juga oleh karakteristik individu, ekspektasi, pandangan terhadap media, serta tingkat aksesibilitas media, yang secara bersama-sama menghasilkan dampak nyata terhadap perilaku dan pemahaman pengguna. Dengan kata lain, intensitas akses media sosial yang tinggi, apabila diarahkan pada konten politik yang

berkualitas, secara teoritis akan menghasilkan efek peningkatan literasi politik.

Argumen logis bahwa tingginya intensitas akses media sosial dapat meningkatkan literasi politik didukung oleh sejumlah temuan empiris. Korelasi yang sangat kuat ditemukan antara penggunaan media sosial Instagram dan literasi politik Gen Z dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Garut ($r = 0,806$; $R^2 = 0,649$) (Nabila, Nurhadi and Kurniawan, 2025). Ini berarti 64,9% variasi literasi politik responden dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan Instagram. Selain itu, persamaan regresi $Y = 2,716 + 0,985X$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan penggunaan Instagram, literasi politik meningkat sebesar 0,985 satuan, yang merupakan hubungan positif dan signifikan secara statistik.

Dalam kajian literatur berbasis multi-sumber menyimpulkan bahwa partisipasi politik yang dilakukan di dunia maya memaksa individu untuk beradaptasi dengan berbagai platform digital, yang berkontribusi pada pengembangan keterampilan digital yang lebih tinggi karena partisipasi dalam diskusi politik membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menggunakan platform sosial secara produktif (Silvia, 2024). Proses belajar dari penggunaan aktif ini secara tidak langsung memperkuat komponen-komponen literasi politik, khususnya dimensi pengetahuan dan partisipasi.

Namun demikian, hubungan antara intensitas akses media sosial dan literasi politik tidaklah linear dan tanpa kondisi. Intensitas media sosial hanya menjelaskan 8,3% dari variasi partisipasi politik digital ($R^2 = 0,083$), sementara 91,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk motivasi politik, literasi digital, dan jaringan sosial (Nesra, Januar and Sulton, 2025). Sumber daya, keterikatan atau motivasi politik, dan mobilisasi dari lingkungan sosial merupakan faktor-faktor kunci dalam mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna. Ini menunjukkan bahwa intensitas akses media sosial bukan satu-satunya, bahkan bukan faktor utama, dalam pembentukan literasi politik.

Dalam kerangka teoritis ini, variabel atensi (perhatian) memainkan peran moderasi yang krusial. Syeda Ammarah Bano, Mubbsher dan Zaheer (2024) menemukan bahwa media *knowledge structure*, yang mencerminkan kualitas pemahaman seseorang tentang bagaimana berita diproduksi dan apa motif di baliknya, merupakan prediktor signifikan bagi pengetahuan tentang peristiwa aktual ($\beta = 0,088$; $p = 0,002$) dan partisipasi politik ($\beta = 0,134$; $p = 0,006$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas atensi terhadap informasi media sosial, bukan sekadar kuantitasnya, yang menentukan apakah intensitas akses berujung pada peningkatan literasi politik atau tidak. Mahasiswa yang mengakses media sosial secara intensif namun kritis akan memiliki literasi politik yang berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan mereka yang mengaksesnya dengan cara yang pasif.

Hubungan antara intensitas akses media sosial dan literasi politik dalam penelitian ini dengan demikian bersifat positif namun kondisional. Secara teoritis, berdasarkan *Uses and Gratifications Theory* dan *Uses and Effects Theory*, serta secara empiris berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan, dapat diargumentasikan bahwa semakin tinggi intensitas mahasiswa dalam mengakses konten politik di media sosial, dengan disertai atensi yang kritis dan jenis platform yang relevan, maka semakin tinggi pula kemungkinan terbentuknya literasi politik yang komprehensif, yang mencakup pengetahuan, minat, dan kecenderungan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan fenomena perubahan fundamental dalam pola sosialisasi politik di kalangan mahasiswa saat ini. Lingkungan sosial dan akademik mahasiswa kini sangat terintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks ini, media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi pelengkap, melainkan telah bertransformasi menjadi agen sosialisasi politik yang dominan. Peran media sosial ini sangat signifikan dalam menggeser dominasi media konvensional sebagai sumber utama informasi bagi kaum muda.

Variabel independen yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Intensitas Akses Media Sosial. Konsep intensitas ini dipahami secara

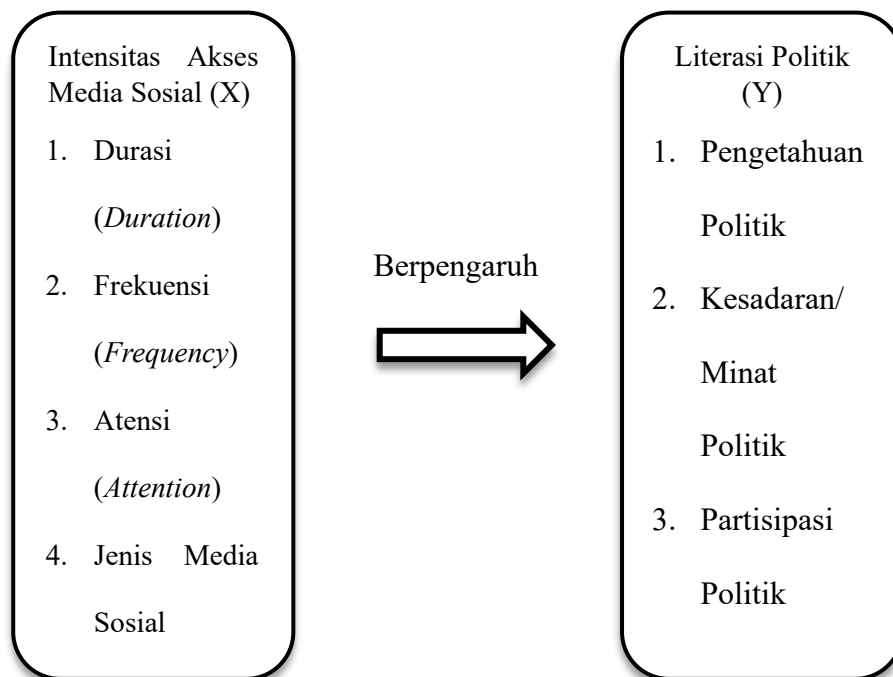
komprehensif, tidak hanya terbatas pada seberapa lama (durasi) atau seberapa sering (frekuensi) mahasiswa berselancar di internet. Lebih dari itu, intensitas juga mencakup kedalaman atensi atau perhatian yang diberikan terhadap konten, serta preferensi terhadap jenis media sosial yang digunakan. Studi menunjukkan bahwa platform berbasis visual dan video pendek, seperti Instagram dan TikTok, kini menjadi saluran utama yang dipilih untuk mengekspresikan pandangan politik serta mengakses perkembangan isu-isu terkini.

Aktivitas yang terjadi di berbagai jenis media sosial tersebut memfasilitasi bentuk interaksi politik yang intensif. Mahasiswa tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi terlibat aktif melalui fitur-fitur interaktif seperti memberikan tanda suka (like), menulis komentar, hingga membagikan ulang (share) konten politik. Proses interaksi yang berkelanjutan di ruang digital ini secara teoritis akan memengaruhi aspek kognitif dan afektif mahasiswa, yang pada akhirnya bermuara pada pembentukan kesadaran politik sebagai inti dari literasi politik.

Pentingnya literasi politik ini juga dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas. Literasi politik yang terbentuk melalui media digital memiliki relevansi kuat dengan upaya mewujudkan keadilan politik (political justice). Dengan memiliki literasi politik yang memadai, mahasiswa dimampukan untuk memahami hak-hak politiknya secara utuh dan berpartisipasi secara kritis dalam sistem demokrasi, sehingga mereka

dapat memposisikan diri sebagai subjek yang aktif, bukan sekadar objek politik.

Berdasarkan alur logika tersebut, diduga terdapat hubungan antara pola konsumsi media sosial dengan tingkat literasi politik. Diasumsikan bahwa jika mahasiswa memiliki intensitas akses yang tinggi yang didukung oleh durasi yang cukup, frekuensi yang sering, atensi yang mendalam, serta penggunaan jenis media sosial yang relevan dengan konten politik maka tingkat literasi politik mereka juga akan mengalami peningkatan. Hubungan antar variabel tersebut divisualisasikan dalam bagan alur berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang dirumuskan secara logis mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian, yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengujian empiris berdasarkan data yang diperoleh (Rohman *et al.*, 2023). Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Utama (H_1)

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara intensitas akses media sosial terhadap literasi politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, PPKn, dan Hukum di Universitas PGRI Madiun. (Artinya: Semakin tinggi intensitas akses media sosial yang bermuatan politik, maka akan semakin tinggi pula tingkat literasi politik mahasiswa).

2. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas akses media sosial terhadap literasi politik mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, PPKn, dan Hukum di Universitas PGRI Madiun. (Artinya: Tinggi atau rendahnya intensitas akses media sosial tidak memberikan dampak nyata terhadap tinggi atau rendahnya literasi politik mahasiswa).